



Judul : Bansos Tunai Perlu Ditambah
Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021
Surat Kabar : Website DPR
Halaman : 7

Bansos Tunai Perlu Ditambah

JAKARTA, (PR).-

Pemerintah perlu menambah nominal bantuan sosial (bansos) tunai untuk mengantisipasi tekanan ekonomi jika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diperpanjang hingga beberapa pekan. Bansos tunai yang saat ini diberikan pun dinilai masih jauh dari ideal dengan kebutuhan masyarakat.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, idealnya bansos yang diberikan Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta selama masa PPKM darurat. "Bansos tunai itu cuma Rp 300.000 per keluarga penerima, itu terlalu kecil. Idealnya Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta per bulan selama masa PPKM darurat," kata Bhima, Rabu (14/7/2021), seperti dilansir dari Antara.

Bhima juga menyarankan pemerintah untuk memberikan subsidi gaji kepada pekerja informal dengan nominal Rp 5 juta selama tiga bulan untuk menjaga daya beli masyarakat tidak terlalu turun selama penerapan PPKM Darurat. "Pekerja harian kalau transportasinya lagi turun seperti sopir, mau pulang kampung juga tidak bisa karena jalanan disekat, sehingga dia kehilangan pendapatan dan berada di kota-kota besar," ujar Bhima.

Selain itu, ia menyarankan agar para pelaku UMKM diberi subsidi kuota internet dan subsidi ongkos kirim agar sektor UMKM tidak terdampak parah seperti awal pandemi Covid-19 tahun lalu.

Menurut dia, hal ini yang dilakukan Malaysia saat mereka memberlakukan lockdown ketat selama 2 minggu. "Itu juga bisa dimasukkan dalam anggaran perlindungan sosial," tuturnya.

Efektivitas

Di sisi lain, Bhima juga menyoroti masih belum efektifnya PPKM Darurat dalam menekan kasus harian Covid 19. Dia pun meminta pemerintah mengintensifkan 3T (*testing, tracking, dan treatment*) untuk menekan penambahan kasus Covid 19.

Terkait anggaran, menurut dia pemerintah bisa kembali merealokasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Anggaran yang sifatnya bisa digeser seperti belanja infrastruktur dan belanja pertahanan, bisa dialokasikan untuk fokus pada dua hal yaitu belanja kesehatan dan perlindungan sosial," tuturnya.

Pemerintah diketahui memiliki skenario perpanjangan PPKM darurat hingga 6 minggu yang diketahui dari bahan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Bangar) DPR RI, Senin (12/7/2021) kemarin.

Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani juga menyatakan akan memfokuskan kembali atau *refocusing* dan merealokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 26 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp 5 triliun atau total Rp 31 triliun untuk menangani pandemi Covid-19.

"Kita sedang mengidentifikasi sekitar Rp 26 triliun (dari belanja K/L) plus *another* Rp 5 triliun dari TKDD," katanya. Upaya ini merupakan tahap ketiga yang dilakukan karena adanya ancaman Covid-19 varian Delta sehingga membutuhkan penanganan serius. "Kami akan menyelesaikan dalam bulan-bulan ini tentu dengan melihat perkembangan Covid-19," ujarnya. **(Kismi Dwi Astuti)*****



ARMIN ABDUL JABBAR/"PR"

WARGA menerima dana bantuan sosial yang didistribusikan di Kantor Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, beberapa waktu lalu.*